

GLOBALISASI DAN METROPOLITAN DI INDONESIA

Wicaksono Sarosa (2006)

Dipublikasikan dalam Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (2006). Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang. Jakarta: PT. Bina Pratama Asih ISBN 979-15540-1-3. Hal 157-171.

Pendahuluan

Walau sudah sering menjadi topik pembicaraan dalam, kurang lebih, seperempat abad terakhir ini –bahkan cenderung menjadi jargon yang klise– istilah ”globalisasi” yang mulai dikenal pada awal 1980-an masih belum memiliki definisi yang disepakati bersama (*Centre for Developing Cities* 2006). Padahal, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan globalisasi akan mempengaruhi sikap terhadap globalisasi tersebut. Lebih-lebih, globalisasi dalam pengertian yang luas sebagai suatu fenomena interaksi dan proses pengaruh-mempengaruhi secara sosial-ekonomi-budaya-demografi dari bagian bumi yang satu ke bagian yang lain pun dapat dikatakan telah berlangsung selama berabad-abad sebagaimana yang tegambarkan dalam kisah Marco Polo atau Admiral Cheng Ho. Hanya saja, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat dalam dua puluh lima tahun terakhir telah membuat fenomena tersebut saat ini berlangsung lebih cepat dan dalam skala yang jauh lebih besar, dengan lingkup yang lebih luas menjangkau berbagai bidang, serta memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi (UN-Habitat 2004).

Terlepas dari perdebatan akademik tentang arti globalisasi, fenomena intensifikasi keterkaitan yang semakin mendunia sebenarnya dapat dirasakan oleh sebagian besar orang, khususnya mereka yang tinggal atau bekerja di kota-kota besar atau metropolitan. Sungguh, globalisasi dan kota adalah dua konsep yang tak terpisahkan. Di satu sisi kota hampir selalu menjadi sumber, simpul dan penggerak dari berbagai perubahan, di sisi lain kota pun merupakan bagian bumi yang paling cepat dipengaruhi oleh berbagai perubahan global. Proses urbanisasi (baik karena migrasi desa-kota ataupun akibat pengalihan fungsi lahan) pun menjadi atribut yang tidak terpisahkan dari globalisasi. Implikasinya, kemampuan suatu bangsa dalam mengelola kota-kotanya sesuai dengan tuntutan global (yang bisa bersifat eksternal maupun *internal*) akan mempengaruhi kemajuan relatif bangsa tersebut di tengah-tengah masyarakat global yang semakin kompetitif. Demikian pula, kemampuan pengelola kota dalam memahami berbagai perubahan global –yang bersifat terus menerus– serta pengaruhnya terhadap kehidupan kota yang dikelolanya akan sangat mempengaruhi kemampuan kota tersebut untuk berkembang dan bersaing dengan kota-kota lain di dunia yang semakin saling tergantung satu sama lain. Dalam konteks inilah pembahasan globalisasi dan kota-kota metropolitan di Indonesia masih (dan selalu akan) dianggap perlu.

Mengunjungi Kembali Globalisasi

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita kunjungi kembali "globalisasi" sebagai suatu fenomena sosial-ekonomi-budaya dan demografi, yang menyebabkan semakin hari semakin banyak bagian dari bumi yang semakin terkait dan saling mempengaruhi. Jan Art Scholte (2000, sebagaimana disarikan oleh Smith 2002) melihat setidaknya ada lima jenis pemahaman tentang globalisasi:

1. Globalisasi dilihat sebagai **internasionalisasi**; yaitu proses meningkatnya hubungan antar-negara, pertukaran antar-negara (*international exchange*) serta kesalingtergantungan. Dalam konteks inilah globalisasi dianggap telah terjadi selama berabad-abad walaupun kecepatan, besaran, lingkup dan kompleksitas perubahannya berbeda. Namun, pada kurun waktu setengah abad terakhir ini terjadi pula proses multilateralisasi yang lebih mendasar, akibat peran penting lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, IMF, Mahkamah Internasional dan belakangan WTO dan terkadang bahkan dapat mendikte kebijakan suatu negara¹, khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian struktural (*structural adjustment*) negara-negara berkembang terhadap sistem ekonomi neo-klasik yang dipercaya oleh lembaga-lembaga multilateral tersebut sebagai pilihan terbaik dalam menghadapi globalisasi. Termasuk dalam kategori pemahaman ini adalah konsep kesaling-tergantungan (*inter-dependency*) yang juga merupakan ciri globalisasi.
2. Globalisasi dilihat sebagai **liberalisasi**; yaitu sebagai proses terhapusnya secara gradual hambatan-hambatan yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagi pergerakan, barang, jasa, informasi dan manusia sehingga akan terbentuk suatu ekonomi dunia yang tanpa batas. Termasuk dalam hal ini adalah penerimaan atau imposisi model ekonomi neo-klasik sebagai paradigma dominan (kalau tidak mau mengatakannya sebagai paradigma tunggal) untuk pembangunan ekonomi, dan oleh karenanya sistem ekonomi nasional pun harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik.
3. Globalisasi dilihat sebagai **universalisasi**; yaitu sebagai proses terbentuknya kesamaan nilai-nilai, norma-norma, cara-pandang serta perilaku ke segala penjuru dunia akibat persebaran informasi, pengalaman, barang, orang dan lain-lain. Peran globalisasi pendidikan -semakin banyanya orang yang bersekolah di negara-negara lain, khususnya di negara-negara Barat yang dianggap "maju"- serta perkembangan teknologi komputer dan internet, serta televisi dan film dilihat sebagai sangat kuat mempengaruhi universalisasi tata-nilai ini.
4. Globalisasi dilihat sebagai **modernisasi** dan, secara lebih sempit, pembaratan (*westernization*): yaitu sebagai dinamika, ditujuakn oleh struktur dan atribut sosial modern (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme dan lain-lain) yang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Seringkali dalam proses memoderenisasi ini menghancurkan budaya serta atribut dan bahkan keswadayaan lokal yang ada. Karena Amerika Serikat

¹ Sebagai salah satu contoh baca Kwik 2006.

– beserta budaya kontemporeranya – sering dilihat sangat mendominasi proses-proses yang ada, salah satu pandangan yang masuk dalam kategori ini melihat globalisasi secara lebih sempit lagi sebagai Amerikanisasi (sebagaimana merebaknya model celana jeans, gerai makan cepat saji ala McDonald atau KFC, minuman ala Coca Cola, media berita ala CNN, bisnis *multi-level marketing* ala Amway dan lain-lain).

5. Globalisasi dilihat sebagai **de-teritorialisasi** (atau malah terbentuknya suatu suprateritorial); yaitu proses rekonfigurasi geografis yang menyebabkan ruang-ruang sosial tidak lagi selalu diartikan secara fisik-teritorial. Pernyataan-pernyataan yang agak berlebih seperti terjadinya "*death of distance*" atau bahkan "*death of geography*"² pun muncul sebagai salah satu penekanan cerminan sudut pandang ini. Dengan pemahaman semacam ini, Anthony Giddens (1990, sebagaimana dikutip oleh Smith 2002) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan-hubungan sosial yang menyeluruh dunia dan menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian sehingga apa yang terjadi di suatu tempat dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kejadian di tempat lain yang berjauhan. Lebih lanjut lagi, perusahaan-perusahaan atau produk-produk tertentu tentu tidak lagi dapat diasosiasikan dengan suatu negara karena baik kepemilikan atau proses pembuatannya tidak lagi terbatas pada pihak-pihak dari satu negara. Demikian pula dengan timbulnya komunitas-komunitas maya (*virtual*) yang terbentuk melalui media internet dan tidak mengenal batas-batas geografis. Salah satu fenomena menarik yang terjadi akhir-akhir ini adalah apa yang disebut *e-tutoring*; banyak murid-murid di Amerika Serikat mengambil semacam les dari guru-guru sekolah di India yang bisa menawarkan jasanya jauh lebih murah daripada guru-guru di Amerika Serikat (Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk lain dari fenomena *e-sub-contracting*; perusahaan-perusahaan *software* di negara maju mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan atau individu di negara berkembang – mungkin tanpa harus bertemu muka – demi menghemat biaya, atau bisa juga merupakan bentuk lain dari kursus-kursus melalui internet yang ditawarkan sekolah-sekolah di negara-negara maju kepada murid-murid di negara berkembang). Berbagai ilustrasi di atas menggambarkan karakteristik kesaling-terkaitan (*inter-connectedness*) dari globalisasi.

Walaupun Scholte lebih cenderung menggunakan pemahaman yang terakhir (de-teritorialisasi) sebagai penjelasan globalisasi, namun sebenarnya masing-masing pemahaman di atas memiliki kandungan kebenaran jika dikaitkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi, hanya berbeda aspek atau sudut pandang. Oleh karenanya tulisan ini – dalam melihat pengaruh globalisasi kepada kota-kota – justru akan menggunakan secara komprehensif kelima pemahaman di atas secara lebih bebas sebagai atribut dari globalisasi, yaitu: (i) meningkatnya interaksi global. (ii) berkurangnya batas-batas bagi mobilitas barang, jasa, informasi dan manusia. (iii) merebaknya tata-nilai 'universal'. (iv) industrialisasi barang dan jasa, dan (v) de-teritorialisasi.

² Pernyataan "*death of geography*" sebagaimana dikutip dalam Smith 2000 tentunya terlalu berlebihan, apalagi mengingat bahwa justru banyak ahli geografi yang menekuni persoalan globalisasi.

Apapun definisinya, globalisasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah mempermudah dan mempercepat arus informasi, barang, jasa dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Akses ke informasi pun semakin terbuka bagi semakin banyak orang. Orang-orang di desa, misalnya, mungkin saja memperoleh informasi tentang pasar global komoditasnya bahkan secara *real-time* melalui internet, telepon genggam atau media lainnya. Suatu unit usaha di suatu negara bisa saja melakukan suatu sub-kontrak dengan suatu pihak dari belahan bumi yang lain tanpa harus bertemu muka. Dan hal-hal seperti ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, baik dalam bekerja, belajar, bertinggal, berbelanja, berlibur, bersosialisasi, dan bahkan dalam berpikir.

Sebaliknya, perluasan pasar yang semakin mengglobal mengakibatkan timbulnya perusahaan-perusahaan berskala besar yang mampu mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk penelitian dan pengembangan produknya. Hal ini, dikombinasikan dengan perkembangan pasar yang juga semakin kompetitif menyebabkan percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya pada perangkat lunak maupun keras bagi komputer, telepon genggam, televisi dan lain-lain). Jadi keterkaitan antara globalisasi dan perkembangan teknologi adalah hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mendorong.

Globalisasi juga dipahami tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja; proses yang sangat kompleks ini juga menyangkut dimensi sosial (misalnya dengan berubahnya struktur dan tingkat kerekatan komunitas di dalam masyarakat); budaya (misalnya dengan kemunculan generasi MTV di kalangan generasi muda di belahan bumi mana pun dan merasa lebih memiliki kesamaan di antara mereka dibanding dengan generasi orang tua di negara yang sama); politik-kelembagaan (misalnya dengan semakin diadopsinya sistem demokrasi ala Barat, yang seringkali diterapkan hanya secara prosedural, jauh dari kultur setempat, di berbagai belahan dunia); lingkungan hidup (misalnya polusi antar-bangsa dalam bentuk asap dari kebakaran hutan di Indonesia yang diderita warga di Singapura, Malaysia dan lainnya); dan juga *spatial* atau tata-ruang (termasuk di dalamnya proses migrasi yang semakin meningkat sehingga menyebabkan tumbuh dan semakin beragamnya "*urban ethnic space*" atau bagian-bagian kota yang dihuni oleh berbagai suku-bangsa secara mengelompok³ (Habitat, 2004; Soegijoko, 2005). Di sini aspek multi-kulturalisme menjadi atribut yang sangat kental bahkan menjadi ciri dari kota-kota global yang kosmopolitan.

Globalisasi pun dipengaruhi oleh perubahan atau pergeseran cara pandang atau cara berpikir, yang kemudian mempengaruhi perilaku di berbagai bidang. Richard Norgaard (1994) melihat, di dunia ini, setidaknya terjadi lima pergeseran cara pandang. Pertama adalah pergeseran dari cara pandang yang bersifat *atomistic* (dengan mana keseluruhan sistem dianggap sama dengan jumlah total dari bagian-bagiannya) ke cara pandang *holistic* (dengan

³ "*Urban ethnic space*" sebagaimana yang dikemukakan dalam Habitat 2004 sebenarnya juga sudah terjadi sejak adanya proses migrasi besar-besaran selama berabad-abad. Kota-kota besar di Nusantara seperti Jakarta misalnya, pernah memiliki sudut-sudut kota yang dihuni oleh migran dari berbagai tempat di Nusantara secara berkelompok-kelompok (Kampung Ambon, Kampung Bali, Kampung Jawa, Kampung Bugis, dan lain-lain). Demikian halnya dengan kota-kota dunia (*global cities*) seperti London, New York atau Paris.

mana keseluruhan sistem tidak selalu dianggap sama dengan jumlah total dari bagian-bagiannya, bisa lebih besar/kuat atau lebih kecil/lemah tergantung bagaimana berhubungan antar-bagian yang ada). Dengan pengertian ini, konsep modal sosial menjadi lebih mudah dipahami. Masyarakat yang secara individu memiliki kapasitas tinggi tetapi secara keseluruhan memiliki modal sosial yang lemah.

Kedua adalah pergeseran dari cara pandang yang mekanistik (*Newtownian*) yang menganggap suatu sistem selalu mempunyai ekuilibrium, ke cara pandang yang lebih mengakui kemungkinan terjadinya ketidakpastian, diskontinuitas dan bahkan *chaos* yang tak ter jelaskan. Termasuk dalam hal ini adalah pengakuan terhadap eksistensi ekonomi informal perkotaan yang seringkali sulit dijelaskan dan didekati secara formal.

Ketiga adalah dari cara pandang universal, yang melihat prinsip-prinsip universal sebagai sesuatu yang tak terbantahkan, ke cara pandang "kontekstualistik" yang mengakui konteks lokal, waktu dan budaya sebagai faktor yang tidak hanya harus dipertimbangkan tetapi justru harus dominan. Pergeseran dalam hal ini tidak bisa dikatakan tuntas karena masih banyak pelaku pembangunan dunia yang sangat percaya dengan nilai-nilai yang sifatnya universal dan berusaha mempromosikan hal tersebut namun di sisi lain juga cukup banyak pelaku pembangunan yang selalu menekankan pentingnya konteks lokal.

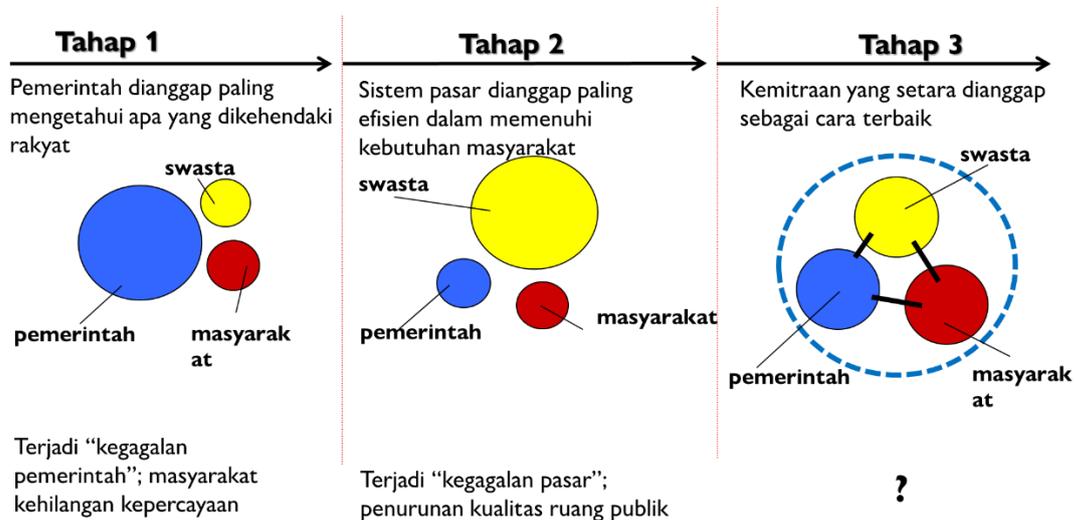
Keempat adalah pergeseran dari cara pandang (umumnya di dunia penelitian atau keilmuan) yang mengagung-agungkan "objektivitas positivisme" ke cara pandang yang mengakui kemungkinan adanya subjektivitas atau keberpihakan di dalam ilmu (yang bisa dianggap sebagai konstruksi sosial). Oleh karenanya, tuntutan akan partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi, terutama untuk mengurangi *bias* dari si pengambil keputusan. Pendekatan dalam penelitian maupun perencanaan yang diakui pun tidak lagi harus bersifat positivistik dan bebas-nilai tetapi mencakup pendekatan penelitian "*participant-observation*" dan pendekatan perencanaan melalui proses-proses komunikasi ("*planning through communication*").

Kelima, Norgaard melihat adanya pergeseran dari cara pandang yang "monistik" yang hanya mengakui satu kebenaran atau penjelasan akan suatu fenomena ke cara pandang yang "pluralistik" yang mengakui kemungkinan adanya beberapa kebenaran atau penjelasan. Kini lebih banyak orang yang bisa (atau terpaksa) menerima perbedaan pendapat dibanding di masa lalu. Terkandung di dalam pergeseran paradigma yang kelima ini adalah multi-kulturalisme sebagai pengakuan bahwa dunia –khususnya kota-kota besar– tidak hanya dihuni oleh manusia-manusia yang berbudaya sama. Namun pada saat yang hampir bersamaan bisa saja terjadi pula penguasaan cara pandang (misalnya pandangan neo-klasik sebagai paradigma dominan ekonomi dunia) atau pemaksaan cara pandang tertentu oleh kekuasaan adidaya (misalnya dalam hal terorisme global).

Pada tataran yang lebih praktis, di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan publik sehari-hari pun telah terjadi pula pergeseran yang cukup berarti. Di masa lalu, pada umumnya pembangunan maupun pengelolaan publik sangat didominasi oleh pemerintah (dan seringkali pemerintah pusat). Kemudian disadari bahwa pemerintah tidak akan mampu

mengerjakan semua hal. Ada hal-hal yang dikenal sebagai "government failures" seperti ketidakefisienan, kekakuan birokrasi, kelembaman untuk berubah dan lain-lain. Memang ada hal-hal yang lebih baik diserahkan kepada pihak-pihak yang dapat bekerja lebih efisien, cepat dan sangat berorientasi pada hasil. Maka timbul era yang menganggap sektor swasta lebih mampu menyediakan berbagai pelayanan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak hanya penyediaan air minum yang diswastakan tetapi bahkan terdapat kota-kota yang hampir sepenuhnya dibangun oleh swasta. Terjadilah gelombang privatisasi di berbagai sektor sebagai bagian dari perubahan pola berpikir global. Di era ini pemerintah diharapkan untuk berperan sebagai regulator saja.

Namun pendekatan yang berorientasi swasta seperti ini pun tidak lepas dari berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kegagalan pasar, swasta tidak akan pernah mampu menyediakan barang atau pelayanan yang sepenuhnya bersifat publik (*public goods*) yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa harus membayar. Swasta pun cenderung tidak mau menyediakan barang atau pelayanan bagi kaum yang sangat miskin di mana marjin keuntungan dianggap sangat tipis atau bahkan tidak ada⁴. Swasta juga cenderung tidak mau melakukan investasi dengan modal yang sangat besar dengan pengembalian modal yang berjangka sangat panjang serta beresiko tinggi. Maka pada tahap berikutnya, pergeseran peran-peran dalam pembangunan ini, peran (atau tuntutan akan peran) masyarakat madani semakin meningkat untuk mengimbangi baik kegagalan pemerintah (*government failures*) maupun kegagalan pasar



GAMBAR 5-7 Diagram Pergeseran Peran Pelaku dalam Pembangunan/Pengelolaan Publik

Perubahan-perubahan semacam ini terjadi di mana-mana, baik di negara maju maupun di negara berkembang – termasuk Indonesia – baik pada tingkatan negara, regional, lokal, komunitas maupun individu – tentunya dengan tahap dan skala maupun intensitas yang berbeda-beda. Salah satu implikasi dari situasi seperti ini adalah timbulnya berbagai ketegangan

⁴ Padahal Prhalad (2004) justru melihat potensi intervensi di tengah-tengah masyarakat yang paling miskin sekalipun.

(*tensions*), baik yang bersifat global, regional maupun lokal dan bahkan pada tataran komunitas dan keluarga. Ketegangan sendiri sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan (*embedded*) dalam globalisasi. Di satu sisi globalisasi membuat batas-batas negara semakin menipis, namun di sisi lain juga terjadi pula gelombang desentralisasi atau lokalisasi di mana timbul tuntutan agar sebanyak mungkin keputusan publik dan pelaksanaannya di lakukan ditingkat lokal/komunitas (atau bahkan primordialisme; "putra daerah" dianggap punya hak lebih dalam banyak hal daripada "pendatang").

Timbul fenomena "*globalization*" yang penuh ketegangan atau tarik ulur antara kekuatan-kekuatan global dan kekuatan-kekuatan lokal. Ketegangan (*tension*) juga timbul manakala produk-produk import yang bisa masuk secara lebih mudah ternyata mematikan atau melemahkan usaha lokal/domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis. Simbol-simbol globalisasi seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, Walmart atau Carrefour sering mendapat tentangan dari komunitas lokal yang tidak menghendaki bisnis-bisnis kecil dan khas tergusur oleh perusahaan global tersebut. Bahkan tentangan terhadap lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF sudah merupakan berita sehari-hari. Lembaga-lembaga global ini sering dilihat sebagai simbol neo-kolonialisme, baik melalui pemaksaan perubahan cara berpikir, kebijakan sosial-ekonomi dan lain-lain melalui persyaratan-persyaratan hutang yang seringkali dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang.

Ketegangan juga timbul akibat dari semakin menguatnya proses privatisasi yang bahkan masuk ke ruang-ruang yang selama ini merupakan domain publik: taman-taman, ruang kota untuk bersosialisasi, penyediaan rumah-rumah, prasarana air minum, jalan utama bahkan pembangunan seluruh kota. Salah satu implikasi dari privatisasi adalah sulitnya dipenuhi kebutuhan kaum miskin karena pihak swasta tentunya lebih memberi perhatian kepada mereka yang mampu membeli layanan atau barang komoditasnya.

Selanjutnya, banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak terlindungi oleh pemerintah lokal terpaksa tergusur oleh toko-toko *wholesale* global seperti Walmart atau Carrefour. Demikian pula dengan bertumbuhannya tingkat keswadayaan lokal dan meningkatnya ketergantungan pada faktor-faktor eksternal yang lebih jauh dapat dianggap mengancam keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Pada intinya, selama akses kepada sumberdaya (termasuk teknologi dan informasi) masih belum merata – dan prospek untuk terjadi pemerataan belum terlihat jelas – maka distribusi manfaat dan biaya dari globalisasi masih akan selalu timpang⁵. Terdapat pihak-pihak yang harus turut menanggung biaya dari globalisasi tetapi tidak menikmati manfaat dari proses yang sedang berlangsung. Atas dasar pertimbangan inilah kemudian timbul gerakan anti-globalisasi yang kemudian berubah menjadi "globalisasi dari bawah" dan menuntut adanya keadilan global.

⁵ Kenyataan ironis di era yang sangat berorientasi kepada teknologi informasi adalah angka yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk dunia belum pernah menggunakan sarana telepon (lihat misalnya *Jakarta Post*. September 21. 2007. hal 17).

Karena hal tersebut di ataslah globalisasi tidak selalu dianggap sebagai suatu yang positif. Bagi mereka yang memiliki akses kepada teknologi dan informasi serta sumberdaya finansial atau lainnya untuk berkompetisi maka globalisasi dapat dianggap sebagai menguntungkan (*beneficial*) secara ekonomi. Demikian pula bagi mereka yang ingin memajukan nilai-nilai seperti demokratisasi, maka proses globalisasi dianggap dapat menyebarkan tata-nilai yang dianggap baik tersebut. Namun, proses-proses ini terjadi tidak tanpa ongkos, yang seringkali harus dipikul oleh pihak-pihak yang tidak menikmati, sehingga timbul penentangan-penentangan sebagaimana diilustrasikan di atas. Memang, ketegangan atau bahkan konflik sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari globalisasi – dengan skala, intensitas dan kompleksitas konflik yang lebih tinggi dibanding dengan apa yang terjadi di era pra-kontemporer. Upaya mengantisipasi dan merespon pun perlu memasukkan pertimbangan adanya ketegangan-ketegangan atau konflik ini.

Implikasi bagi Kota-kota Metropolitan

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, globalisasi dan urbanisasi merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan. Kota-kota, khususnya kawasan metropololitan, merupakan sumber, simpul dan pergerak berbagai perubahan yang kemudian menggelinging menjadi apa yang disebut globalisasi. Sebaliknya pengaruh globalisasi paling cepat dan paling besar dirasakan di kota-kota (oleh masyarakat kota). Dan karean seringkali koat-kota besar atau metropolitan memiliki keunggulan infrastruktur dibanding kota-kota yang lebih kecil, maka terjadi proses pelebaran kesenjangan penerimaan manfaat globalisasi antara kota-kota besar dan kota-kota yang lebih kecil atau kawasan perdesaan.

Pengusaha-pengusaha global cenderung memilih kota-kota besar sebagai pusat dan simpul operasinya, terutama karena keunggulan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang bersifat global (misalnya jaringan telekomunikasi global), tempat berkumpulnya berbagai bisnis sejenis atau terkait yang dapat menciptakan apa yang disebut *agglomeration of economies* (pengumpulan berbagai ekonomi terkait). Kota-kota besar umumnya juga menawarkan pasar – atau akses ke pasar – yang relatif lebih besar daripada yang ada pada kota-kota lebih kecil. Demikian pula, kota-kota besar juga cenderung memiliki *pool* yang lebih besar akan tenaga ahli dengan pendidikan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Lebih jauh lagi, Manuel Castells menekankan pentingnya suatu *milleu of innovation* atau suatu kumpulan komunitas manusia yang berorientasi teknologi informasi untuk dapat selalu memiliki keunggulan komparatif di era globalisasi ini (Castells 1986). *Milleu of innovation* semacam ini cenderung terbentuk di sekitar perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga risetnya; dan umumnya perguruan tinggi tersebut berada di dekat kota besar. Contoh yang sering dirujuk adalah kota San Francisco dengan Bay Area-nya (tempat Silicon Valley berada) yang merupakan tempat bagi Stanford University, University of California at Berkeley dan berbagai universitas lain, atau Boston Metropolitan Area (tempat Route 128 berada) dengan Harvard University dan Massachusett Institute of Technology dan berbagai universitas

terpandang lainnya. Berbagai inovasi yang kemudian mendunia sering muncul dari kedua kawasan perkotaan tersebut maupun dari tempat-tempat lain yang sejenis.

Namun, dalam perkembangan paling akhir, sebagaimana dilaporkan dalam *Newsweek* July 3-10, 2006, telah terjadi pergeseran pilihan lokasi investasi (khususnya di sektor jasa dan industri informasi-telekomunikasi) dengan adanya kecenderungan untuk memilih kota-kota kedua (*secondary cities*) yang dianggap lebih nyaman ditinggali daripada kota-kota metropolitan yang ditandai dengan harga properti yang semakin mahal, kemacetan lalu-lintas yang semakin parah, polusi yang semakin menyesak serta kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan. Namun pergeseran seperti ini hanya terjadi pada *secondary cities* yang memiliki akses teknologi komunikasi informasi serta *amenities* (atribut untuk kenyamanan, baik secara fisik maupun socio-kultural) yang baik dan tidak kalah dengan kota-kota besar. Dengan perkembangan terakhir seperti ini, kota-kota metropolitan pun bersaing dengan kota-kota yang lebih kecil dalam upaya mendatangkan investasi yang lebih memiliki nilai tambah relatif lebih besar yang ada pada sektor-sektor terkait dengan teknologi-telekomunikasi-informasi (dibanding pada sektor-sektor manufaktur konvensional yang sering lebih mengandalkan tenaga buruh murah sebagai basis pilihan lokasi).

Globalisasi pun dapat mempengaruhi struktur tata ruang *internal* kawasan metropolitan. Walaupun pola aktifitas ekonomi yang berpusat pada kawasan pusat kota masih tetap mendominasi kegiatan sehari-hari di berbagai kota metropolitan di dunia (sehingga menimbulkan arus penglaju yang sangat besar dari pinggiran kota ke pusat kota di pagi hari dan sebaliknya di sore hari), namun perkembangan teknologi-informasi telah sedikit-banyak mengurangi ketergantungan untuk aktifitas tatap-muka sehingga timbul pusat-pusat baru di pinggiran kota, baik yang berskala kota-baru atau kota satelit maupun yang hanya berupa warung-warung telekomunikasi di kawasan-kawasan permukiman pinggiran.

Di banyak kota-kota besar dunia, misalnya, perusahaan-perusahaan tertentu membolehkan karyawannya untuk datang ke kantor pusat hanya dua atau tiga hari seminggu, sisanya mereka dapat berkantor di kantor-kantor cabang di pinggiran kota atau di fasilitas semacam warung telekomunikasi di dekat mereka tinggal, atau bahkan dari rumah mereka masing-masing. Toh mereka tetap bisa mengerjakan banyak hal, termasuk berkomunikasi dengan mitra usaha di mancanegara dari rumah atau kantor di pinggiran atau warung telekomunikasi terdekat. Hal seperti ini tentunya dapat mengurangi biaya transportasi dan jumlah penglaju harian di kawasan kota metropolitan sekaligus mempengaruhi tata-ruang yang ada. Kecenderungan yang terjadi di banyak kawasan metropolitan di dunia –khususnya di negara-negara maju– adalah terbentuknya apa yang sering disebut sebagai *decentralized concentration* atau konsentrasi yang terdesentralisasi. Sementara di kota-kota besar di negara berkembang yang berpenduduk besar tetapi memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Indonesia yang umumnya terjadi justru suatu *mega urban sprawl*; kawasan perkotaan menyambung menjadi satu (walaupun mungkin saja masih terdapat kawasan berkarakter perdesaan di dalamnya), yang seringkali tumbuh tidak teratur.

Secara terstruktur, pengaruh globalisasi terhadap kota-kota, khususnya kota metropolitan dapat dilihat sebagai memiliki tiga tataran atau aras:

[1] Pengaruh globalisasi pada sistem perkotaan global; menurut Sassen (1994), terdapat kota-kota global tingkatan pertama seperti New York, London dan Tokyo, serta tingkatan-tingkatan di bawahnya yang menunjukkan besarnya/luasnya cakupan pengaruh kota-kota tersebut –khususnya di bidang ekonomi-finansial– baik di tingkat global maupun regional. Walaupun di tingkat teratas sistem perkotaan global mungkin tidak banyak terjadi perubahan (ketiga kota yang disebut di atas masih belum tergoyahkan oleh kota-kota lainnya), namun pada tingkatan-tingkatan di bawahnya susunan kota-kota lebih mudah berubah. Tersirat di sini adalah adanya kompetisi antar-kota untuk menjadi semacam "pusat" atau "hub" (simpul) kegiatan ekonomi dari suatu region –kalau bukan dunia– sebagaimana yang terlihat pada persaingan yang cukup ketat antara Singapura dan Bangkok dalam upaya mereka menjadi *hub* bagi lalu-lintas udara di Asia Tenggara.

[2] Pengaruh globalisasi pada hubungan yang juga dinamis (selalu berubah) antara kota-kota utama atau metropolitan dan kota-kota sekunder di sekitarnya. Kalau di masa lalu kota-kota sekunder sering dilihat hanya sebagai pendukung bagi kota-kota metropolitan, khususnya dalam penyediaan hunian yang murah dan nyaman, atau setidaknya sebagai kota-kota pinggir (edge cities), maka dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi banyak kota-kota sekunder yang kemudian berkembang menjadi kota-kota yang lebih mandiri (*self-sustained*) dan mempunyai aktifitas-aktifitas yang berhubungan langsung ke bagian dunia yang lain tanpa harus tergantung pada atau melalui kota metropolitan terdekat. Sebagaimana yang diuraikan di atas, terdapat pula kecenderungan pelaku dunia usaha global justru untuk memilih kota-kota sekunder yang memiliki *amenities* yang baik namun terbebas dari kemacetan dan polusi kota-kota metropolitan. Namun pergeseran semacam ini tidak bisa dibilang permanen. Perkembangan ke depan akan sangat tergantung pada perkembangan teknologi telekomunikasi-informasi dan pola aktifitas sosial-ekonomi.

[3] Pengaruh globalisasi pada tata-ruang internal suatu kawasan metropolitan. Dalam hal ini, yang terjadi di suatu kota metropolitan tidak sama dengan yang terjadi di kawasan metropolitan lain, sangat tergantung kepada seberapa jauh kota metropolitan tersebut terbuka (*exposed*) terhadap globalisasi serta faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya dan geografis yang ada serta seberapa jauh pemerintah dan warga kota metropolitan tersebut mampu mempertahankan ciri-ciri khasnya. Namun secara umum terdapat pola perubahan tata ruang yang sangat dipengaruhi oleh berubahnya sistem ekonomi-bisnis dunia. Sebagai contoh, dengan banyaknya industri manufaktur yang pindah dari negara-negara dengan biaya buruh rendah (umumnya di negara berkembang) –seringkali masih menyisakan kantor pusatnya di kota asal, tetapi banyak pula yang memindahkan kantor pusatnya ke kota lain yang lebih strategis. Akibatnya, banyak kota-kota di negara maju yang harus berjuang untuk "mengisi kekosongan sosial-ekonomi" yang diakibatkan oleh perginya tempat-tempat usaha (dan sumber-sumber pekerjaan) tersebut; ada yang berhasil mendapatkan basis ekonomi baru namun banyak juga yang masih *struggling* hingga kini. Sementara kota-kota di negara berkembang pun tidak luput

dari ancaman yang sama dari apa yang disebut *footloose industries* tersebut, karena seiring dengan kemajuan ekonomi negara berkembang tersebut, maka ongkos buruh akan semakin meningkat dan selalu ada saja negara atau kota lain yang dapat menawarkan lingkungan usaha dengan ongkos yang lebih murah.

Dari sudut berbagai dimensi yang ada, pengaruh globalisasi pada kota-kota metropolitan dapat disusun ke dalam suatu matriks atau kerangka analisis sebagai ditunjukkan dalam TABEL 5-17 berikut:

TABEL 5-17 Pengaruh Globalisasi Pada Umumnya dan Terhadap Tata Ruang Kota

Dimensi	Pengaruh Umum	Pengaruh pada Tata Ruang Kota (Dimensi Spasial)
Dimensi Ekonomi-Finansial	<p>Paradigma neo-klasik sebagai paradigma tunggal/dominan. Pasar bebas diagung-agungkan, hambatan dan tarif perdagangan dikurangi.</p> <p>Tumbuh dan tersebar nya perusahaan global seperti McDonald, Walmart, Carrefour, dll yang mendesak atau mematikan usaha-usaha kecil lokal yang kecil.</p> <p>Pembagian kerja yang bersifat global (komponen-komponen bisa dibuat terpisah, tergantung pengaturan mana yang paling menguntungkan).</p> <p>Banyak pula perusahaan-perusahaan global yang bersifat <i>footloose</i> atau mudah berpindah tempat usaha (biasanya meninggalkan mitra lokal begitu saja).</p> <p>Arus aliran modal, barang dan jasa (serta manusia) yang semakin deras meningkat.</p> <p>Kesenjangan ekonomi cenderung melebar (lebih terasa di kota-kota negara berkembang, tetapi juga terjadi di kota-kota negara maju).</p>	<p>Privatisasi ruang-ruang publik serta berbagai pelayanan umum –seperti penyediaan air, pengelolaan sampah, pendidikan dan kesehatan– yang di masa lalu lebih banyak diasosiasikan sebagai pelayanan publik.</p> <p>Konflik keruangan antara tekanan ekonomi global dan keinginan untuk mempertahankan usaha-usaha yang bersifat lokal.</p> <p>Berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha di tempat-tempat tinggal (banyak yang bekerja dari rumah) atau di "warung telekomunikasi" terdekat.</p> <p>Salah satu akibatnya adalah pola <i>commuting</i> menjadi tidak sejelas pada tatanan yang konvensional (pagi berangkat sore pulang, sama setiap hari kerja).</p> <p>Kontras yang semakin lebar antara kawasan bagi orang-orang yang berpenghasilan menengah/tinggi (punya akses ke jaringan global) dan kawasan bagi mereka yang tidak punya akses ke jaringan global atau yang terdesak oleh globalisasi ekonomi.</p> <p>Di sisi lain terdapat pula pengakuan (secara parsial) terhadap aktifitas ekonomi perkotaan informal, termasuk akomodasi spasialnya.</p>

<p>Dimensi Sosial-Budaya Demografis</p>	<p>Tumbuhnya budaya-budaya dan nilai-nilai sosial yang bersifat mendunia (diakui dan diadopsi di berbagai tempat di dunia), baik yang bersifat positif (saling memahami perbedaan, demokratis, dll.) maupun yang bersifat negatif (hilangnya atau berkurangnya ke-khasan lokal)</p> <p>Arus migrasi yang semakin pesat dan semakin menglobal (semakin banyak orang yang tidak hanya berpindah dari desa ke kota tapi juga dari suatu negara ke negara lain).</p> <p>Tumbuhnya multikulturalisme, tapi juga disertai dengan konflik antar budaya.</p>	<p>Wajah kota "moderen" yang hampir sama di manapun (termasuk dalam wujud <i>shopping mall</i> atau pusat belanja yang tidak berbeda secara signifikan antara <i>mall</i> di Jakarta atau <i>mall</i> di Bangkok atau di Buenos Aires).</p> <p>Tumbuhnya ruang-ruang kota yang terkait dengan etnik atau bangsa-bangsa tertentu dalam satu kota metropolitan (sesuai dengan negara atau tempat asal-usul dari para migran kota tersebut).</p>
<p>Dimensi Politik-Kelembagaan</p>	<p>Peran atau pengaruh negara semakin berkurang seiring dengan menguatnya peran dan pengaruh lembaga-lembaga multi-lateral dan MNCs</p> <p>Namun pada saat yang sama juga terjadi desentralisasi; peran pemerintah dan masyarakat daerah/kota semakin besar.</p> <p>Peran partisipasi masyarakat yang semakin penting (atau tuntutan akan partisipasi yang semakin besar), namun pada saat yang bersamaan, pendidikan yang umumnya belum merata di masyarakat juga menyebabkan proses demokratisasi yang lebih "prosedural" daripada substantif.</p>	<p>Peran negara dalam pengelolaan kota semakin berkurang, diambil alih oleh peran pemerintah kota, masyarakat kota dan swasta (termasuk swasta yang bersifat global).</p> <p>Tumbuhnya kerekatan komunitas yang tidak sepenuhnya berdasarkan kesamaan tempat, tetapi lebih berdasarkan kesamaan profesi, <i>hobby</i> atau lainnya.</p> <p>Tuntutan akan pengelolaan kota yang demokratis dan terbentuknya wujud kota yang berkeadilan (pada saat yang bersamaan dengan semakin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi).</p>
<p>Dimensi Lingkungan (Ekologis)</p>	<p>Dampak lingkungan suatu kegiatan yang bisa bersifat antar-negara seperti dalam pembuangan sampah baik yang bersifat berbahaya maupun yang tidak (umumnya dari negara maju ke negara berkembang-seringkali</p>	<p>Tuntutan akan kerjasama antar-kota (tidak terbatas pada kota-kota yang berada dalam satu <i>region</i>) semakin meningkat.</p> <p>Tuntutan akan perhatian pemerintah kota kepada aspek-aspek lingkungan dalam tata ruang seperti jumlah ruang hijau, kebun kota dan lain-lain.</p>

	<p>tidak terbatas pada yang bertetangga). Secara umum "ecological footprints" (tapak ekologis) yang semakin meluas dan bahkan mengglobal. Berkembangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan alam (termasuk taman-taman dan kehijauan) dalam mendukung keberlanjutan lingkungan binaan.</p>	<p>Pemerintah kota tidak lagi dapat dengan mudah mengurangi ruang hijau tanpa mendapat retensi dari masyarakat. Investor global pun turut memperhatikan kualitas lingkungan kota yang ada (terutama dalam kaitannya dengan kompetisi antar-kota yang sejenis).</p>
--	---	--

Implikasi dan Tantangan bagi Kota-Kota Metropolitan di Indonesia

Di Indonesia, karena tingkat ketersediaan infrastruktur yang terkait dengan berbagai aspek globalisasi di atas sangat timpang antara kawasan metropolitan Jabodetabek dengan kawasan-kawasan metropolitan lainnya (Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, masing-masing dengan kota dan kabupaten di sekitarnya) dan apalagi dengan sekian banyak kota-kota kecil yang ada, maka tingkat keterbukaan (*exposure*) dan saling pengaruh-mempengaruhi antara kota dan globalisasi pun sangat berbeda. Bahkan di dalam kawasan Jabodetabek pun tingkat keterbukaan terhadap globalisasi tidak merata – ada bagian-bagian kawasan yang sangat mencerminkan kota global (misalnya di Jakarta; kawasan Kemang, Thamrin-Sudirman-Kuningan, atau bahkan Jalan Jaksa), namun masih banyak pula bagian-bagian kawasan yang seolah-olah tidak atau sangat sedikit tersentuh oleh globalisasi (misalnya di beberapa perkampungan-perkampungan kumuh)⁶. Ketimpangan tersebut membuat generalisasi menjadi sesuatu hal yang sulit. Ketika membicarakan pengaruh globalisasi pada kota-kota metropolitan di Indonesia, apa yang dialami oleh Jakarta dan sekitarnya tidak sama dengan apa yang dialami oleh kota-kota metropolitan lainnya.

Jakarta –beserta wilayah di sekitarnya– dapat dikatakan merupakan kawasan metropolitan yang paling mendalam dan langsung bersinggungan (*exposed*) oleh globalisasi⁷. Hampir seluruh pusat perwakilan badan usaha internasional (perusahaan multinasional, bank internasional, perwakilan kamar dagang asing dll.) di Indonesia berlokasi di Jakarta; demikian pula untuk aspek-aspek non-ekonomi seperti pusat kebudayaan asing, perpustakaan asing dan lain-lain. Kawasan industri yang menampung berbagai industri yang bersifat internasional –kalau belum bisa dikatakan global– pun lebih banyak berada di sekitar Jakarta daripada di

⁶ Dapat pula kita cermati bahwa di beberapa perkampungan kumuh pun terdapat berbagai aktivitas yang memiliki "nuansa globalisasi" seperti produksi kerajinan dari *fiberglass* di Kawasan Prumpung yang sudah menjual produksi hingga ke Malaysia dan Timur Tengah.

⁷ Sebenarnya Balipun merupakan bagian Indonesia yang sangat terimbas dan bersinggungan langsung dengan globalisasi (dalam arti "internasionalisasi" maupun lainnya), namun sangat spesifik berkaitan dengan satu sektor ekonomi-budaya yaitu pariwisata.

sekitar kota-kota metropolitan lain di Indonesia. Bagi Indonesia, bandar udara Soekarno-Hatta pun merupakan bandara yang paling banyak melayani penerbangan internasional.

Namun demikian, di tingkat global atau bahkan regional peran Jakarta masih sangat terbatas. Di Asia Tenggara saja, Jakarta bisa dikatakan masih kalah dari Singapura dan Bangkok sebagai pusat aktifitas internasional -baik yang bersifat ekonomi-finansial, politik-kelembagaan (tempat lembaga-lembaga internasional dengan salah satu perkecualian Sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta), budaya, pendidikan maupun sebagai *hub* lalu-lintas udara dan laut. Apalagi kalau diangkat ke tingkat Asia di mana terdapat Tokyo, Hong Kong dan Shanghai maupun Mumbai (khususnya untuk Asia Selatan). Kota-kota metropolitan di Indonesia lain tentunya punya peran dan ketersinggungan dengan globalisasi yang jauh lebih kecil daripada Jakarta.

Sementara itu, sebagaimana yang sudah ditulis di atas, pada tataran nasional Jakarta masih merupakan kawasan perkotaan yang paling berpengaruh, jauh melampaui kota-kota dengan pengaruh besar berikutnya, yaitu Surabaya, Bandung dan Medan. Fenomena global di mana kota-kota sekunder (bukan metropolitan) mulai bersinggungan dengan globalisasi belum cukup terasa di Indonesia, terutama karena ketersediaan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Kawasan perkotaan Denpasar-Kuta-Nusa Dua di Bali dan Kota Yogyakarta mungkin secara nyata juga memiliki *exposure* internasional yang sangat besar, namun terkonsentrasi pada satu sektor utama yaitu pariwisata, dan dalam taraf tertentu pendidikan (khusus untuk Yogyakarta). Sehingga boleh dikatakan bahwa globalisasi belum mempengaruhi, apalagi mengubah, sistem kota-kota yang ada di Indonesia.

Dengan tingkat *exposure* yang masih sangat terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa globalisasi juga belum secara signifikan mempengaruhi tata ruang perkotaan metropolitan di Indonesia, masih terbatas pada tumbuhnya –secara sporadis– kawasan-kawasan industri yang melayani unit-unit usaha internasional atau melakukan sub-kontrak dari jaringan usaha internasional. Seringkali jenis usaha dan sistem kerjasamanya memudahkan pemilik jaringan usaha internasional untuk memindahkan usahanya kemanapun mereka ingin lakukan (umumnya *bargaining position* pihak Indonesia –atau tuan rumah di mana pun di negara berkembang lainnya– dalam hal ini relatif rendah).

Hal di atas dapat disimpulkan kalau kita hanya melihat globalisasi dari sudut pandang "internasionalisasi" saja. Dari sudut pandang lain, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang agak berbeda. Dalam konteks "liberalisasi" misalnya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya sudah sangat terbuka. Kita dapat menemui gerai-gerai internasional seperti McDonalds atau KFC tidak hanya di Jakarta tetapi bahkan hingga di kota-kota sekunder (sebagai perbandingan, Hanoi hingga tulisan ini dibuat masih belum mengizinkan adanya gerai-gerai internasional semacam itu). *Wholesale retailers* seperti Carrefour pun memiliki cukup banyak *outlets* di Jakarta. Berbagai merek internasional mewarnai pusat-pusat perdagangan baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lain. Privatisasi pun telah berjalan cukup lama. Bahkan sejumlah kota baru seperti Bumi Serpong Damai, Lippo Karawaci, Bintaro Jaya, Bukit Sentul,

Kota Wisata dan lain-lain hampir sepenuhnya dibangun oleh pihak swasta. Di kota-kota metropolitan lain pun terdapat kawasan hunian cukup luas -kalau belum bisa disebut kota- yang hampir sepenuhnya dibangun oleh pihak swasta.

Sudut pandang bernuansa "universalisasi" dan "modernisasi" pun sudah banyak merasuk ke dalam pola pikir masyarakat kota, baik di pejabat pemerintah maupun pelaku swasta. Proses pergeseran peran dari situasi pemerintah mendominasi ke situasi swasta mengambil peran cukup signifikan dalam pembangunan hingga situasi di mana tuntutan akan peran masyarakat yang semakin besar pun terjadi di kota-kota di Indonesia. Implikasi peran besar swasta dalam tata ruang kota dapat dilihat dari banyaknya bagian-bagian kota yang mengalami proses "urban renewal" seperti misalnya kawasan Segitiga Emas (Sudirman-Kuningan-Gatot Subroto) yang kemudian diikuti oleh proses jentifikasi masyarakat berpenghasilan rendah ke daerah-daerah pinggiran (GAMBAR 5-8).



GAMBAR 5-8 Kawasan "Segitiga Emas" di Jakarta

Atribut "de-teritorialisasi" dari globalisasi pun dalam skala yang relatif kecil dan terpisah-pisah telah terjadi di kota-kota besar Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih khusus lagi pada segmen-segmen masyarakat yang memiliki akses ke jaringan global secara mudah. Ada saja –walaupun mungkin belum tersebar luas– kegiatan-kegiatan yang mencerminkan ketiadaan batas-batas negara atau kota seperti terlihat pada kegiatan-kegiatan sub-kontrak pembuatan *software*, animasi, gambar rancang-bangun dan lain-lain yang didapat dari perusahaan-perusahaan besar di negara maju untuk proyek-proyek yang mungkin di negara lainnya.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara berkembang lain, kota-kota besar di Indonesia juga mencerminkan kontras yang sangat tajam. Ada bagian-bagian kota atau anggota masyarakat kota yang sudah sangat ter-*exposed* oleh globalisasi, dan sebagian dari kelompok ini mampu memanfaatkan *exposure* ini secara baik, namun ada pula bagian-bagian kota atau anggota masyarakat kota yang sama sekali belum "tersentuh" oleh globalisasi. Demikian pula dengan cara berfikir, cara pandang, terhadap berbagai persoalan. Ada yang sudah membuka wawasannya dengan cara-pandang yang "baru" seperti yang bersifat holistik, kontekstual dan pluralistik, sementara tidak sedikit yang masih berfikir dengan cara-pandang yang atomistik,

Newtonian, positivistik dan monistik. Hal ini tentunya mengakibatkan berbagai ketegangan yang semakin terasa dengan semakin besar dan terbukanya suatu kota.

Penutup

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kota-kota metropolitan di Indonesia sebenarnya sudah mulai bersinggungan dengan globalisasi dengan derajat yang berbeda-beda. Namun kecuali kawasan metropolitan Jakarta, persinggungan dengan globalisasi masih sangat terbatas. Di dalam suatu kawasan metropolitanpun –termasuk Jakarta– ketimpangan globalisasi sangat besar. Seringkali, mereka yang tidak turut mendapat manfaat dari globalisasi harus turut menanggung biaya atau beban yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mengambil manfaat sebesar mungkin dan secara merata dari proses-proses globalisasi dan mengurangi sejauh mungkin dampak negatifnya, termasuk implikasinya dalam tata-ruang. Jika Indonesia tidak mau ketinggalan di era globalisasi yang semakin kompetitif, konsentrasi pembangunan yang terlalu terpusat di Jakarta harus dikurangi. Kawasan-kawasan metropolitan lainnya harus mendapat dukungan infrastruktur secara lebih memadai sehingga tidak terlalu ketinggalan dan dapat turut berkompetisi di tingkat internasional. Peran kota-kota sekunder pun tidak dapat diabaikan, apalagi jika dikaitkan dengan keinginan untuk memajukan sektor pertanian –kota-kota sekunder tersebut dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi komoditas pertanian (konsep agropolitan)– namun tidak harus terbatas pada konsep itu. Persebaran pusat-pusat kegiatan pun menjadi sangat penting, tanpa mengurangi kecenderungan pasar untuk membentuk apa yang disebut *agglomeration of economies*. Secara *internal*, tata ruang kawasan metropolitan pun harus mampu mengikuti dinamika globalisasi tanpa harus mengabaikan kepentingan konteks dan kekhasan lokal.

Daftar Pustaka

Centre for Developing Cities (2006) Course Manual for District and Provincial Planning in Australia in Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase III, Hal. 11. Canberra, University of Canberra

UN-Habitat (2004) The State of the World's Cities 2004/2005. London and Sterling, VA: Earthscan dan UN-Habitat

Castells, Manuel (1986) The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. London, Blackwell

Gie, Kwik Kian (2006) "Pengemis Tak Punya Pilihan", Kompas, 26 September 2006, hal. 6

Sassen, Saskia (1994) Cities in a World Economy. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press

Jakarta Post. September 21. 2007. hal 17

Richard Florida "The Megalopolis" Newsweek July 3-10, 2006

Richard Norgaard (1994) Development Betrayed, the end of progress and coevolutionary revisioning of the future. New York: Routledge

Prahalad (2004) The future at the Bottom of the Pyramid. Jakarta: Indeks

Soegijoko (2005)

Anthony Giddens (1990) dalam Smith (2002)

Jan Art Scholte (2000) dalam Smith (2002)